KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Siswa tidak otomatis naik kelas, kebijakan pendidikan diminta dikaji ulang
Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Siswa Tidak Otomatis Naik Kelas

Kebijakan Pendidikan Diminta Dikaji Ulang

ANGGOTA Komisi X DPR Muhammad Hilman Mufidi menyoroti rencana kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas yang dimulai tahun 2027. Kebijakan itu perlu dikaji secara mendalam agar perubahan sistem kenaikan kelas tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses pembelajaran di sekolah.

"Kebijakan tidak otomatis naik kelas merupakan perubahan mendasar dari sistem yang selama ini berjalan," tandas Hilman di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Kebijakan itu merupakan rekomendasi dari Dewan Pendidikan Nasional dan menjadi perhatian serius Kemendikdasmen.

"Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan," ujar Mu'ti, dalam siaran pers, Kamis (8/10/2026).

Mu'ti menilai, perubahan itu diperlukan untuk membangun kembali kesungguhan siswa dalam belajar. Karena selama ini ada fenomena dengan 'rumus RMS' atau 'rajin malas sama saja'. Kondisi tersebut dinilai tidak sehat jika dibiarkan menjadi budaya dalam sistem pendidikan.

Hilman melanjutkan, Pemerintah perlu mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kesiapan sekolah, kompetensi guru, metode pembelajaran, hingga pemahaman siswa dan orang tua. Karena selama ini, sistem yang berjalan cenderung membuat siswa merasa mereka akan tetap naik kelas.

"Kalau kebijakan ini diterapkan, tentu ada perubahan paradigma yang cukup besar. Jadi sekolah, guru, siswa, dan orang tua mesti dipersiapkan agar bisa beradaptasi dengan baik," imbau politisi PKB ini.

Ia menilai, penerapan kebijakan tersebut tidak boleh semata-mata berorientasi pada penahanan kenaikan kelas bagi siswa yang belum mencapai standar. Pemerintah juga perlu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memperbaiki kemampuan akademiknya.

Karena itu, Hilman meminta, adanya pendampingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru mesti mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi setiap anak, memberikan bimbingan tambahan, serta menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Ia mengingatkan, jangan sampai kebijakan ini hanya dimaknai sebagai hukuman bagi siswa yang belum memenuhi standar. "Yang paling penting adalah bagaimana sekolah membantu mereka memperbaiki kemampuan, mengejar ketertinggalan, dan mencapai kompetensi yang diharapkan," tegas legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Hilman menilai, kebijakan tersebut perlu disertai standar penilaian yang jelas, objektif, dan transparan. Dengan demikian, keputusan kenaikan kelas tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif, tetapi benar-benar mengacu pada capaian kompetensi siswa. ■ TIF